

DINAMIKA STRUKTUR KETENAGAKERJAAN DI PEDESAAN JAWA BARAT (DYNAMIC STRUCTURE OF THE MAN POWER IN WEST JAVA VILLAGES)

SUGIARTO

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
Badan Litbang Pertanian, Bogor

ABSTRACT

Since of the crisis, the agriculture sector must be responsible to shift by labor from non agriculture to agriculture sector. In the macro level, GDP of agriculture sector increase from 51,8 percent in 1961 to 16 percent in 1995, is not fallow with labor force absorption from 41 percent in 1997 to 45 percent in 1998. The condition micro level in West Java villages research "Panel Penelitian Petani Nasional (Patanas)" from 1983 years and 2000 years the result to show that: a) Number of household in 2000 the majority are up to 6 education level than 1983 years, but the number of labor force which absorption in agriculture is almost same with condition 1983 years, is that the majority consist education level under 6 years. b) The majority number of household in ages level 20 to 25 years in 2000 to work in non agriculture, but the opposite the agriculture to consist up to 40 years, c) Number of household has already worked 2000 years were oriented to commercial effort with main status wage laborer (40%) than others status. d) Main of source the mean livelihood household in villages 2000 years have the pattern diversification in many sectors than 1983 years which agriculture sector concentration, is the same with source of that diversification to many sectors . Although after come to change of the role man power since 17 years, during crisis and after crisis agriculture sector can absorption labor force to villages and severance of relation in others sectors. Therefore to accelerate balance of labor force and economics growth are necessary get up non-agriculture sector has already stagnation to economics crisis.

Key words: Dynamic, Labor Force, Villages

PENDAHULUAN

Fenomena dalam pembangunan pertanian selama Orde Baru yang diikuti oleh krisis ekonomi adalah semakin kenyalnya sektor pertanian untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan terutama di pedesaan. Walaupun pembangunan tersebut belum diikuti dengan keseimbangan pergeseran struktur ekonomi secara sektoral dengan pergeseran tenaga kerja secara keseluruhan. Atau dengan perkataan lain, pergeseran sektoral lebih cepat dibandingkan laju pergeseran tenaga kerja.

Perubahan struktur yang tidak berimbang di antaranya adalah penurunan sektor pertanian terhadap PDB yang sangat tajam, yaitu dari 51,8 persen tahun 1961 menjadi 16 persen tahun 1995, yang diikuti oleh penurunan penyerapan tenaga kerja dari 73,3 persen tahun 1961 menjadi 48 persen tahun 1995. Namun ketika krisis ekonomi, sektor pertanian kembali menunjukkan peranannya dalam penyerapan tenaga kerja yakni dari 41 persen tahun 1997 menjadi 45 persen tahun 1998 (Sakernas, BPS Tabel 13 dalam Ahmed, 1999). Konsekuensinya adalah sektor pertanian menanggung beban yang berat, dan apabila sektor

pertanian tidak dipersiapkan dengan baik akan mengakibatkan kemerosotan produktivitas tenaga kerja pertanian di pedesaan.

Dari beberapa hasil penelitian bahwa dalam bidang ketenagakerjaan, kurang berkembangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas kerja di sektor ekonomi pedesaan yang mengakibatkan mengalirnya tenaga kerja usia muda terdidik ke wilayah perkotaan (Spare and Haris, 1986; Manning 1992). Salah satu penyebab lambanya peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah lambanya peningkatan upah riil buruh pertanian (Manning dan Jayasuria, 1996 ; White, 1992) atau mengalami stagnasi, sementara itu upah riil non tani terus mengalami penurunan (Erwidodo dkk, 1993).

Pada masa krisis seca agregat upah riil yang diterima angkatan kerja turun sekitar 34,1 persen tahun 1998 dibanding tahun 1997, dan upah riil tenaga kerja pertanian turun sekitar 26,6 persen, sebagai akibat konsekuensi beralihnya tenaga kerja di sektor non pertanian dan di samping adanya tambahan tenaga kerja yang baru (Ikhsan, 1999 dalam Kasryno 1999). Walaupun demikian aktivitas non pertanian masih menjadi tumpuan harapan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pedesaan, terutama buruh tani tak berlahan. Namun keterlibatan buruh tani pada kegiatan non pertanian lebih banyak pada kegiatan dengan produktivitas rendah (Hart, 1986).

Sementara itu keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah didirungi dengan ketidak terlibatan tenaga kerja muda dengan pendidikan yang tinggi untuk masuk pada pasar tenaga kerja di sektor pertanian, karena ; a) terbatasnya kesempatan kerja pertanian bagi yang berpendidikan lebih tinggi, b) sektor pertanian umumnya tidak bisa mendatangkan pendapatan dalam waktu singkat, c) usaha pertanian mengandung banyak resiko, d) pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian lebih rendah dari yang diharapkan dan 5) kurangnya status sosial dan kenyamanan kerja, karena kesan usaha pertanian yang kumuh (Dewa, K.S. et all 2001).

Kondisi periode dan pasca krisis yang belum diikuti bangkitnya sektor non pertanian, mengakibatkan proses mobilitas tenaga kerja mengalami stagnasi, baik karena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun tenaga kerja yang baru, sehingga sektor pertanian merupakan suatu alternatif penyerap tenaga kerja, walaupun penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja tua yang relatif banyak dan kurang pendidikan dibanding tenaga muda.

Penelitian ini dirancang dalam bentuk Panel seperti PATANAS (Panel Petani Nasional) yang terus menerus dilaksanakan pada setiap periode tertentu, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika dari beberapa aspek di daerah pedesaan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menelaah salah satu aspek yakni ketenagakerjaan,

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika ketenagakerjaan dan potensinya dalam tahun 2000 dibandingkan dengan kondisi tahun 1984.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian PATANAS (Panel Petani Nasional) tahun anggaran 2000 dengan salah satu topik tentang ketenagakerjaan, yang diambil dari hasil pengumpulan data primer sensus rumahtangga di daerah penelitian Jawa Barat. Jumlah desa yang diambil dalam penelitian tahun 2000 ini adalah sebanyak 15 desa, merupakan desa-desa yang telah pernah diteliti dengan metode yang sama dalam tahun 1984. Desa yang diambil didasarkan pada agroekosistem dan tipe iklim yang berbeda, sehingga dapat mencirikan kondisi desa yang bersangkutan (Lampiran 1)

Dari hasil pengumpulan data yang dikelompokkan berdasarkan tipe iklim (sesuai dengan pembandingan hasil penelitian tahun 1984), kemudian disetarakan dengan pengumpulan data tahun 2000 guna melihat perubahan yang terjadi pada kedua tahun tersebut. Untuk data sekunder diperlukan informasi dari hasil penelitian tahun 1984 dan referensi data atau studi pustaka yang menunjang penulisan. Analisa data disajikan dalam bentuk tabulasi silang guna mempertajam narasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kondisi Makro Ketenagakerjaan

Kalau dilihat secara berkala antara penyerapan tenaga kerja yang terjadi selama tiga periode terakhir (1971 – 1997) yang dikelompokkan menurut berbagai sektor, bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor lainnya yaitu sekitar 75 persen dari total penyerapan tenaga kerja dipedesaan atau sekitar 65 persen dari total tenaga kerja pada tahun 1971 menjadi 58 persen dari total penyerapan tenaga kerja di pedesaan atau sekitar 38 persen dari total tenaga kerja (Tabel 1). Artinya bahwa selama periode tersebut telah terjadi migrasi sektoral yang diikuti dengan pembangunan sektor non pertanian sebagai basis pembangunan industri yang ketersediaan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Beberapa sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja terbanyak, selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan dan sektor jasa lain berkisar 6,0 persen hingga 9,0 persen (1971) menjadi 6,0 persen hingga 10,0 persen (1997) dari total tenaga kerja di pedesaan dan total tenaga kerja. Namun pertumbuhan di sektor pertanian secara kumulatif meningkat, akan tetapi pangsanya lebih kecil (1,2 % per tahun) dibanding sektor lain (3 % - 9 % per tahun). Hal ini berarti ada kesejajaran antara migrasi sektoral dengan pertumbuhan

sektor non pertanian yang sedemikian pesatnya, walaupun secara kumulatif penyerapan tenagaakerja non pertanian lebih kecil dibanding sektor pertanian.

Tabel 1. Struktur Tenagaakerja Berdasarkan Sektor Ekonomi di Pedesaan, 1971–1997

Sektor Ekonomi	Penyerapan tenagaakerja di Pedesaan (ribu orang/%)				Pertumbuhan (%/th)
	1971	1980	1991	1997	
1. Pertanian	24.532,3 (75,07)	27.350,1 (66,16)	38.971,7 (69,26)	33.497,9 (58,28)	1,2
2. Industri	2.020,5 (6,18)	3.042,9 (7,36)	4.274,7 (7,60)	6.100,4 (10,61)	4,3
3. Perdagangan	2.978,4 (9,11)	4.292,3 (10,38)	5.750,9 (10,22)	7.948,4 (13,83)	3,8
4. Konstruksi	387,6 (1,19)	1.078,1 (2,61)	1.310 (2,33)	2.423,4 (4,22)	7,3
5. Pertambangan	64,2 (0,20)	287,4 (0,70)	386,2 (0,69)	643,3 (1,12)	9,3
6. Transportasi dan komunikasi	484,6 (1,48)	758,3 (1,83)	1.144,7 (2,03)	1.934,0 (3,36)	5,5
7. Listrik, gas dan air	9,0 (0,03)	44,2 (0,11)	42,5 (0,08)	59,0 (0,10)	7,5
8. Keuangan/Perbankan	31,0 (0,09)	73,5 (0,18)	141,5 (0,25)	110,3 (0,19)	5,0
9. Jasa Lainnya	2.160,9 (6,61)	4.380,4 (8,69)	4.247,5 (7,55)	4.759,8 (8,28)	3,1
Total Tenagaakerja Pedesaan	32.678,4 (86,76)	41.342,3 (80,69)	56.269,7 (73,63)	57.475,0 (66,03)	2,2
Total Tenagaakerja	37.663,6	51.233,6	76.423,2	87.049,8	3,3

Sumber : BPS, 1971 – 1997 Kasryno dalam Dewa KS.dkk. 2000

Keterangan : () persentase masing-masing sektor terhadap total tenagaakerja dan tenagaakerja pedesaan terhadap total tenagaakerja

Atau dengan perkataan lain di sektor pertanian dalam perkembangannya harus mengurangi sejumlah tenagaakerja yang terserap, sedangkan di sisi lain harus mampu menyediakan peluang kesempatan kerja bagi mereka yang melakukan arus balik ke sektor pertanian. Oleh karena itu untuk mengatasi beban yang semakin berat di sektor pertanian adalah membangkitkan kembali sektor non pertanian baik itu yang berbasis agroindustri, jasa, perdagangan dan konstruksi (Dewa KS Swastika. et al. 2000) .

Di lain pihak, secara agregat penyerapan tenagaakerja yang terjadi di sektor pertanian adalah merupakan akumulasi dari peranan beberapa sub sektor yang mendukungnya. Pada Tabel 2 bahwa secara nasional maupun di tingkat propinsi Jawa Barat, dalam periode 1992-1997 subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura mampu menyerap tenagaakerja terbanyak, kemudian perkebunan, peternakan dan perikanan, kecuali dalam pertumbuhannya dari tahun 1992–1997 secara nasional menurun 3,44 persen pertahun, yang diikuti dengan menurunnya perkembangan tenagaakerja di subsektor tanaman pangan dan hortikultura

sebesar 5,9 persen per tahun. Kondisi ini merupakan suatu indikasi betapa rumitnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor non pertanian yang akan kembali atau melakukan arus balik masuk ke sektor pertanian.

Tabel 2. Perkembangan tenaga kerja pertanian di Indonesia, 1992 – 1997

Tahun	Sektor Pertanian (persentase)			Total (orang)
	Tan.Pangan dan Hortikultura	Perkebunan	Peternakan dan Perikanan	
1992	72,80 (84,5)	17,32 (9,9)	9,88 (5,6)	41.160.615 (5.526.499)
1993	71,12 (84,9)	16,68 (7,8)	12,20 (7,2)	39.057.278 (4.935.557)
1994	62,58 (81,4)	22,45 (9,2)	14,97 (9,4)	36.851.780 (4.243.992)
1995	78,33 (88,1)	17,69 (5,9)	13,98 (6,0)	31.012.806 (3.822.192)
1996	64,39 (87,8)	22,02 (6,5)	13,39 (5,7)	35.164.410 (4.560.120)
1997	64,02 (90,6)	23,20 (4,5)	12,78 (5,9)	34.555.660 (3.626.694)
Pert (%/th	- 5,89	2,36	1,68	- 3,44

Sumber : Vademekum sumberdaya, BPS 1992-1997, yang diolah.

Sementara itu dalam kegiatan berusaha akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang ada. Di mana kesempatan kerja yang terjadi antar waktu akan selalu bervariasi sesuai dengan pola status pekerjaan. Pada Tabel 3, bila dikelompokkan tenaga kerja yang terserap di pertanian berdasarkan status pekerjaan yang terjadi dalam satu dekade (1986–1998) menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang meningkat pada semua status tenaga kerja dari 1,68 persen per tahun hingga 12,53 persen per tahun, kecuali status tenaga kerja keluarga tidak dibayar yang menurun 1,82 persen per /tahun. Walaupun demikian jumlah tenaga kerja pada status tenaga kerja tidak dibayar lebih besar dibandingkan dengan status tenaga kerja lainnya yang terus meningkat dari tahun 1986 hingga tahun 1992, dan kemudian turun hingga 1996 dan tahun 1998. Hal ini menunjukkan ada pergeseran dari sebagian tenaga kerja yang tidak dibayar ke arah tenaga kerja yang dibayar, atau dengan perkataan lain telah berubah orientasi tenaga kerja pada suatu sistem usahatani yang subsisten ke arah usahatani komersial. Pergeseran tersebut ditandai oleh meningkatnya status tenaga kerja berusahatani dengan tenaga buruh tetap yang semula sekitar 112.600 orang tahun 1986 meningkat menjadi 464.200 orang tahun 1998 dan buruh tani atau karyawan dari 3.531.100 orang tahun 1986

menjadi 5.210.200 orang tahun 1998. Meningkatnya jumlah buruh tani di pertanian disebabkan selain adanya arus balik karena masalah krisis ekonomi dengan jenis pekerjaan yang tidak mengandalkan skill (buruh bangunan, tukang becak/batu) atau sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan atau mempunyai lahan dengan luas yang relatif sempit.

Dari segi kualitas tenagakerja menunjukkan bahwa sebagian tenagakerja yang terserap di sektor pertanian selama satu dekade (1991 – 1999) masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD tamat, tidak tamat SD dan tidak sekolah. Hal ini sesuai dengan berbagai hasil penelitian baik ditingkat mikro maupun makro, bahwa sebagian besar tenagakerja yang terserap disektor pertanian adalah mereka yang berpendidikan rendah dengan tingkat kemampuan yang kurang memadai untuk mengadopsi berbagai perubahan, baik teknologi, dan dinamika sosial ekonomi.

Tabel 3. Perkembangan Status Tenagakerja Pertanian di Indonesia 1986–1998

Status Pekerjaan	Penyerapan tenagakerja (ribu orang dan %)									Pertumbuhan (%/th)
	1986	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
1. Berusaha sendiri	5880,6 (15,6)	6157,9 (14,9)	6176,4 (16,6)	6097,3 (15,2)	5781,4 (15,3)	7835,7 (22,3)	6226,5 (16,5)	6771,2 (18,9)	7183,5 (18,2)	1,68
2. Berusahatani dgn keluarga dan buruh	12136,4 (32,2)	13412,1 (32,6)	13887,5 (32,9)	13243,1 (33,0)	12803,2 (33,8)	10758,2 (30,7)	14483,4 (38,4)	11645 (32,5)	13772,3 (34,9)	1,06
3. Berusahatani dengan tenaga buruh tetap	112,6 (0,30)	201,4 (0,5)	189,6 (0,4)	213,0 (0,5)	196,2 (0,5)	304,6 (0,8)	314,8 (0,8)	435,8 (1,2)	464,2 (1,2)	12,53
4. Buruh tani/karyawan	3531,3 (9,38)	4657,5 (11,3)	4876,6 (11,6)	4954,9 (12,4)	4850,1 (12,8)	4963,5 (14,1)	4942,3 (13,1)	4812,5 (13,4)	5210,2 (13,2)	3,29
5. Tenagakerja tidak dibayar	15932,5 (42,3)	16775,6 (40,7)	17023 (40,5)	15563,2 (38,9)	14226,5 (37,6)	11266,7 (32,1)	11753,3 (31,1)	12184,2 (34,0)	12784,7 (32,4)	- 1,82
Jumlah Tenagakerja Pertanian	37644,5 (100)	41205,8 (100)	42153,2 (100)	40071,8 (100)	37857,4 (100)	35129,9 (100)	37720,3 (100)	35848,6 (100)	39414,8 (100)	
Total tenagakerja pertanian thd total tenagakerja (%)	55	53,9	53,6	50,6)	46,1	43,8	44,0	41,1	44,9	

Sumber : Biro Pusa statistik, berbagai tahun dari tahun 1986 - 1998

Namun demikian, secara kumulatif selama dekade tersebut terjadi penurunan jumlah tenagakerja pertanian yang berpendidikan SD ke bawah dari 36.702,7 ribu jiwa tahun 1991 menjadi 31.642,1 ribu jiwa tahun 1999 atau turun 5.000 ribu jiwa, yang diikuti secara kumulatif meningkatnya jumlah tenagakerja yang berpendidikan diatas SD dari 4.503 ribu jiwa tahun 1991 menjadi 6.736 ribu jiwa tahun 1999 atau meningkat 2.233 ribu jiwa. Dari beberapa hasil penelitian seperti yang dilakukan Nurmanaf (1989), Dewa KS. Swastika., et al (2001), Syafaat et al (1999) dan Nurmalina (dalam Suryana 1989), ada beberapa indikator yang menunjukkan dominasi tenagakerja yang berpendidikan SD terserap di sektor pertanian antara lain: a) terbatasnya kesempatan kerja di pertanian untuk yang berpendidikan tinggi, b) rendahnya tingkat pendapatan dan upah yang diterima dan kurang sesuai dengan tingginya

pendidikan, c) usaha pertanian mengandung resiko tinggi, d) kurangnya status sosial dan kenyamanan kerja dibanding sektor yang lain.

Hal yang sangat menarik pada Tabel 3 dan 4 bahwa semenjak adanya krisis tahun 1997 hingga tahun 1999, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan dan berbagai status tenaga kerja sekitar 3,3 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian lebih kenyal dibanding sektor lainnya untuk lebih cepat bangkit dari kondisi krisis dalam menyediakan peluang dan kesempatan kerja. Walaupun secara agregat jumlah penyerapan tenaga kerja yang terbanyak adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah, dan ini merupakan indikasi adanya arus balik dari tenaga kerja di wilayah kota (*urban*) karena pemutusan hubungan kerja atau mereka yang kurang mendapat kesempatan kerja diluar sektor pertanian.

Tabel 4. Perkembangan Struktur Pendidikan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, 1986-1999

Tingkat Pendidikan	Penyerapan Tenaga Kerja (Persen dan ribu orang)								
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Tdk sekolah	7355,7 (17,9)	7532,7 (17,8)	6822,6 (17,1)	6350,3 (16,8)	6620,3 (18,8)	5849,9 (15,6)	5634,7 (15,8)	5652,5 (14,3)	5148,51 (13,4)
2. Tdk tamat SD	12597,7 (30,6)	13472,7 (31,9)	12567,5 (31,1)	11805,4 (31,2)	11805,0 (33,6)	10554,0 (28,0)	11057,4 (30,8)	10347,4 (26,2)	9722,4 (25,4)
3. Tamat SD	16749,3 (40,6)	16623,4 (39,5)	16268,5 (40,6)	15342,7 (40,5)	12603,3 (35,7)	16475,9 (43,6)	14418,8 (40,2)	17290,6 (43,9)	16771,2 (43,7)
4. SLTP	3299,5 (8,0)	3219,1 (7,7)	3050,5 (7,7)	2951,8 (7,7)	2705,2 (7,7)	3223,3 (8,5)	3205,9 (8,9)	4091,6 (10,4)	4544,6 (11,8)
5. SLTA	1126,5 (2,7)	1225,7 (2,9)	1274,7 (3,1)	1337,2 (3,6)	1410,4 (4,0)	1524,0 (4,1)	1439 (4,1)	1916,6 (4,8)	2081,3 (5,4)
6. Akademi	56,4 (0,1)	54,3 (0,1)	61 (0,1)	37,9 (0,1)	36,8 (0,1)	48,8 (0,1)	40,7 (0,1)	60,7 (0,2)	43,7 (0,1)
7. PT	20,3*) (0,1)	24*) (0,1)	27,2*) (0,1)	31,8*) (0,1)	51,8 (0,1)	43,8 (0,1)	51,8 (0,1)	51,8 (0,1)	66,0 (0,2)
Tenaga kerja Pertanian	41205,7 (100)	42153,2 (100)	40071,8 (100)	37857,5 (100)	35233,2 (100)	37720,2 (100)	35848,6 (100)	39414,7 (100)	38378,1 (100)
Total thd tenaga kerja	76423,1 (53,9)	78518,3 (53,6)	79200,5 (50,6)	82038,1 (46,1)	80110,0 (43,9)	85701,8 (44,0)	87049,7 (41,2)	87672,4 (44,9)	88816,8 (43,2)

Sumber : Sakernas BPS 1991 – 1999 yang diolah

Keterangan : *) kurang dari 0,1 persen
() menunjukkan persentase

Kondisi Mikro Ketenagakerjaan di Pedesaan Jawa Barat (Penelitian “Patanas “) dan Perubahan ketenagaan kerja menurut pendidikan dan kelompok umur

Gambaran mikro ketenagakerjaan yang dilakukan di daerah penelitian PATANAS Jawa Barat antara tahun 1983 dan 2000 menunjukkan bahwa perbandingan jumlah anggota rumah tangga yang berpendidikan SD kebawah pada tahun 2000 lebih rendah hingga 59,1 persen sampai 77,5 persen. Namun di antara daerah menurut tipe iklim, pada tipe iklim E

(daerah kering) jumlah anggota rumahtangga yang tidak berpendidikan (lama pendidikan 0 tahun) lebih tinggi dibanding dengan daerah beriklim basah (Tabel 5). Akan tetapi lama pendidikan 6 tahun ke atas cenderung sebaliknya untuk semua tipe iklim, yaitu terjadi kecenderungan yang menurun.

Sebaliknya untuk jenjang pendidikan di atas 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun perbandingannya justru sebaliknya, yaitu melebihi 100 persen. Artinya bahwa pada tahun 2000 motivasi anggota rumahtangga telah berorientasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibanding pada tahun 1983. Hal ini disebabkan dengan adanya program wajib belajar yang terjadi selama 17 tahun, telah mampu membuka kesadaran rumah tangga pedesaan untuk meningkatkan kemampuan belajar pada jenjang pendidikan yang mereka inginkan.

Tabel 5. Perbandingan jumlah persentase anggota rumahtangga usia 15 - 54 tahun pada sensus Patanas 1983 dan Sensus Patanas 2000 menurut tingkat pendidikan di Desa Patanas Jawa Barat.

Tingkat Pendidikan	Tipe Iklim					Total
	A	B	C	D	E	
Tidak Sekolah	86.9	55.6	57.5	59.9	52.7	59.1
S/d SD (6 Th)	87.1	67.7	84.7	85.3	109.5	77.5
SLTP (7 – 9 Th)	117.2	155.5	198	221.7	420	167.6
SLTA (10 – 12 Th)	161.5	133.9	312	19.3	250	141.6
Akd/PT (diatas 12 Th)	71.4	95	290	121.4	175	109.4
Total	91.7	75.4	89.9	79.4	86.6	80.5

Tingkat Partisipasi Kerja

Sementara itu, ratio angkatan kerja mengalami perubahan dari 0,81 tahun 1983 menjadi 0,69 persen tahun 2000, artinya bahwa potensi angkatan kerja pada tahun 2000 dalam satu rumahtangga lebih tinggi dibandingkan tahun 1983. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa anggota rumahtangga yang berumur kurang dari 15 tahun sudah aktif bekerja membantu orang tuanya, dan usia di atas 55 tahun masih aktif bekerja seperti halnya anggota rumahtangga yang lain (Tabel 6).

Lebih lanjut pada tahun 1983 menunjukkan bahwa pada daerah dengan iklim kering (D dan E) rasio angkatan kerja lebih tinggi dibanding daerah iklim basah. Akan tetapi pada tahun 2000 rasio angkatan kerja relatif hampir sama, kecuali pada daerah tipe iklim D (kering) yang lebih tinggi dibanding yang lain. Perubahan dari masing-masing tipe iklim disebabkan oleh terjadinya perubahan komposisi anggota rumahtangga dari kelompok usia kerja yang belum masuk usia kerja pada tahun 1983 menjadi kelompok usia kerja pada tahun 2000.

Walaupun demikian komposisi angkatan kerja belum bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga, karena ada keterkaitan dengan kesempatan kerja dan kecenderungan penduduk pada usia berapa mereka mau bekerja.

Tabel 6. Rasio angkatan kerjan Rumahtangga menurut Tipe Iklim di Desa Contoh sensus Patanas Jawa Barat 1983 – 2000.

Tipe Iklim	Persentase angkatan Kerja	
	1983	2000
A	0.78	0.66
B	0.76	0.69
C	0.78	0.72
D	0.91	0.66
E	0.81	0.69
Rata – rata	0.81	0.69

Sedangkan untuk melihat peluang kesempatan kerja yang mampu diisi oleh sebagian penduduk yang berkerja, perlu kita proksikan berdasarkan tingkat partisipasi kerja seperti dalam Tabel 7. Pada Tabel tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja baik secara spasial maupun secara agregrat wilayah meningkat dari tahun 1983 hingga tahun 2000. Walaupun secara absolut jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 1983 lebih tinggi dibanding tahun 2000. Pada daerah iklim kering (E) walaupun mengalami peningkatan, namun dalam perkembangannya hingga tahun 2000 lebih rendah dari tipe iklim yang lain. Kondisi ini selain disebabkan masalah krisis sebagai dilemma yang umum juga karena kurangnya akses terhadap pusat perekonomian atau karena penduduk dalam usia kerja masih meneruskan tingkat pendidikan atau mencari peluang kerja (Sugiarto, 1995).

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tipe Iklim di Desa Contoh Sensus Patanas Jawa Barat 1983 – 2000.

Tipe Iklim	Tahun 1983			Tahun 2000		
	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	Partisipasi Angkatan Kerja
A	1022	601	0.59	920	644	0.71
B	4233	2885	0.68	3230	2385	0.73
C	918	609	0.66	830	719	0.86
D	1646	1017	0.62	1520	1090	0.71
E	442	286	0.65	524	309	0.58
Total	8261	5398	0.65	7034	5147	0.73

Berbeda dengan partisipasi angkatan kerja, bahwa angkatan kerja yang ada dengan jumlah yang bekerja rasionya relatif lebih tinggi, karena tidak dimasukkan jumlah anggota rumahtangga yang menjadi beban bagi angkatan yang bekerja. Namun dengan memasukkan anggota rumahtangga, rasio angkatan kerja dengan total rumahtangga akan semakin kecil (Tabel 8). Hal ini karena ada sebagian anggota rumahtangga yang masih sekolah, menganggur atau masih mencari kerja atau anggota rumahtangga yang sudah pensiun, cacat karena tidak bisa bekerja atau orang yang sudah tua (jompo) dan sebagai ibu rumahtangga. Pada tahun 1983 menunjukkan bahwa satu anggota rumahtangga harus menanggung beban yang tidak bekerja lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2000.

Tabel 8. Beban ketergantungan anggota rumahtangga berdasarkan Tipe Iklim di Daerah Contoh sensus Patanas Jawa Barat, 1983 – 2000.

Tipe Iklim	Tahun 1983			Tahun 2000		
	Jumlah ART	Jumlah AK yang bekerja	Beban ketergantungan	Jumlah ART	Jumlah AK Yang bekerja	Beban Ketergantungan
A	1658	601	2.76	1535	644	2.4
B	6441	2885	2.23	5483	2385	2.3
C	1570	609	2.6	1432	719	2.0
D	3034	1017	3.0	2522	1090	2.31
E	1024	286	3.6	877	309	2.83
Total	13727	5398	2.5	11861	5147	2.30

Kelompok Umur Menurut Sektor dan Tingkat Pendidikan

Dilain pihak karena kurangnya ketersediaan data tahun 1983 tentang kelompok umur dan sumber mata pencaharian, maka yang dapat diajukan adalah kondisi tahun 2000. Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar tenagakerja dari berbagai daerah menurut tipe iklim melakukan pekerjaannya yang bersumber pada matapencaharian di luar sektor pertanian. Hal ini memberikan implikasi bahwa setelah masa krisis sebagian penduduk pedesaan sudah berorientasi pada jenis kegiatan yang modern dibanding kegiatan pertanian yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muda. Terutama pada pada kelompok usia kurang dari 20 tahun dan 20–30 tahun sekitar 40 persen hingga 60 persen baik pria maupun wanita melakukan kegiatan dengan sumber matapencaharian utama non pertanian. Hal ini sesuai dengan penelitian Kasryno (1996) bahwa tenagakerja yang terserap di sektor pertanian didominasi tenagakerja yang berumur diatas 50 tahun dengan pendidikan yang rendah bahkan tidak berpendidikan. Hal sama dikemukakan Susilowati, et al (1999) bahwa tenagakerja muda dengan usia 15 tahun hingga 25 tahun akan cenderung memilih sumber

matapencapaian di luar sektor pertanian yang sebanding dengan tingkat pendidikan yang mereka kuasai. Indikasi lain adanya alternatif tidak memilih sektor pertanian bagi tenaga kerja muda karena sektor pertanian bagi kaum muda merupakan sektor tradisional yang kurang banyak diminati atau dengan perkataan lain kurang mengangkat prestise pemuda bila dibandingkan dengan peran sektor non pertanian, atau sektor pertanian memberikan insentif yang rendah dengan curahan waktu yang lebih banyak bila dibandingkan sektor non pertanian (Dewa K.S. Swastika, et al . 2001).

Tabel .9. Struktur tenaga kerja menurut kelompok umur dan sektor di daerah penelitian Patanas Jawa Barat 2000.

Kelompok Umur (Tahun)	Tipe Iklim											
	A		B		C		D		E		Total	
	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
< 20	7.6	53.8	3.5	50.7	5.5	45.5	11.5	53.0	8.6	25.3	6.5	47.1
20 - 50	73.4	38.2	63.5	41.4	53.7	43.8	70.3	40.2	72.8	71.3	66.1	45.6
> 50	19.0	8.0	33	7.8	40.8	10.7	18.2	6.8	18.6	18.5	27.4	7.3
Total :												
(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(n)	437	1081	1189	4246	292	1136	683	2054	162	724	2763	9341

Permasalahan yang lebih mendalam apabila terus menerus sektor pertanian diisi oleh tenaga kerja yang berusia diatas 50 tahun, dikhawatirkan pada periode sepuluh tahun mendatang ketersediaan tenaga kerja akan semakin langka dan akhirnya produktivitas kerja dan produksi hasil pertanian akan berdampak negatif. Hal ini yang memberatkan bagi sektor pertanian apabila tidak secara cepat merubah orientasi penduduk desa dengan peran teknologi pertanian, walaupun teknologi tersebut memerlukan biaya tinggi dan kurang terjangkau oleh petani kecil.

Selain sumber matapencapaian utama kegiatan lain sebagai suatu alternatif adalah usaha sampingan yang diharapkan untuk mengisi waktu luang dan menambah pendapatan keluarga. Kegiatan sampingan ini merupakan kegiatan yang diukur dari besarnya curahan waktu dan pendapatan yang lebih rendah dibanding kegiatan utama. Kegiatan mata pencapaian sampingan merupakan kegiatan yang mempunyai kekuatan tawar menawar yang rendah, karena dianggap sebagai suatu alternatif untuk menambah penghasilan keluarga. Seperti halnya pada kegiatan utama, bahwa sektor non pertanian masih merupakan alternatif yang tertinggi bagi anggota rumahtangga pada usia kerja 30 tahun ke bawah. Namun demikian secara agregat porsi sektor pertanian sebagai sumber matapencapaian sampingan lebih tinggi dari sektor non pertanian. Posisi ini merupakan suatu indikasi bagi sektor

pertanian yang sangat lemah karena hanya sebagai kegiatan sampingan untuk mengantisipasi kegiatan sumber matapencaharian utama bila sudah tidak menampung lagi ketersediaan tenagakerja yang ada.

Selain sumber matapencaharian, peran pendidikan anggota rumahtangga sangat penting, karena semakin tinggi tingkat pendidikan akan cenderung memposisikannya dengan sumber matapencaharian yang mengandalkan kemampuan skill dan managerial dibanding kemampuan fisik. Dampak dari perkembangan ekonomi selama 17 tahun memberikan peluang kesempatan kerja bagi tenagakerja yang berpendidikan lebih tinggi akan masuk dalam pasar tenagakerja yang memberikan insentif lebih tinggi. Tabel 10 menunjukkan bahwa sumber matapencaharian utama sebagian besar anggota rumahtangga (30%-60%) adalah di sektor pertanian dengan tingkat lama pendidikan 6 tahun ke bawah. Ini berarti bahwa ketersediaan tenagakerja yang kurang mengandalkan skill masih memposisikan untuk mengisi sumber matapencaharian pada sektor pertanian dibandingkan sektor non pertanian. Sebaliknya untuk kelompok pendidikan di atas tujuh tahun lebih dominan berperan untuk mengisi sumber matapencaharian utama di luar non pertanian.

Tabel 10. Struktur tenagakerja menurut tingkat pendidikan dan sektor di daerah penelitian Patanas Jawa Barat 2000.

Tingkat Pendidikan	Tipe Iklim dan persentase											
	A		B		C		D		E		Total	
	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
Tidak Sekolah	4.8	24.4	5.6	19.9	20.5	19.1	25.4	28.4	28.4	33.2	13.3	23.1
S/d SD (6 Th)	83.3	56.1	77	50.4	67.1	54.8	65.9	52.9	58.6	50.8	73.1	52.2
SLTP (7- 9 Th)	7.5	12.0	11.9	18.0	7.8		6.1	12.5	8.6	9.4	9.1	14.8
SLTA (10-12 Th)	4.1	6.1	4.9	9.5	4.1	10.7	2.0	5.3	3.7	3.2	3.9	7.9
Akd/PT > 12 Th)	0.2	1.3	0.5	2.0	0.3	2.5	0.4	0.7	0.6	3.2	0.4	1.8
Total :												
(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(n)	437	1081	1189	4246	292	1136	683	2054	162	724	2763	9341

Sedangkan untuk tingkat lama pendidikan 7 tahun hingga 9 tahun ke atas sumber matapencaharian anggota rumahtangga cenderung sektor non pertanian lebih tinggi dibanding sektor pertanian (iklim B,C dan A,D), kecuali pada daerah iklim E dimana sumber matapencaharian tenagakerja pada jenjang pendidikan tersebut sangat kurang. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada daerah tipe iklim basah dan sedang dengan tingkat pendidikan diatas 7 tahun hingga 9 tahun mempunyai peluang yang besar didalam mengisi kesempatan kerja yang ada baik di pertanian atau diluar pertanian. Atau dengan perkataan lain pada daerah iklim basah dan umumnya dataran rendah lebih akses terhadap perkembangan

sektor non pertanian (sektor industri, jasa, perdagangan) yang mengakibatkan sering terjadi migrasi sektoral di luar pertanian.

Sumber Matapencarian, Status Pekerjaan dan Pendapatan

Pada Tabel 11 tampak bahwa anggota rumahtangga di pedesaan, sebagian besar sumber matapencarian utama adalah sebagai buruh upahan (25%-75%), kemudian usaha sendiri dengan buruh upahan (10%-30%) di sektor pertanian dan sisanya di luar pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa curahan waktu yang digunakan lebih diutamakan untuk mencari sumber matapencarian di sektor pertanian sebagai buruh upahan, atau kemungkinan peluang kesempatan kerja di sektor lain kurang terdiversifikasi. Atau dengan perkataan lain meskipun telah berkembang pekerjaan di luar sektor pertanian, namun kontribusi waktu kerja di sektor pertanian lebih dominan. Ada beberapa yang mempengaruhi ketersediaan buruh upahan adalah karena penguasaan lahan dan garapan yang timpang, sehingga memungkinkan buruh upahan mendapat porsi untuk mengisi peluang kerja yang ada, atau karena ada fragmentasi lahan menjadi petak lahan yang kecil yang berakibat ketersediaan sisa waktu kerja digunakan untuk kegiatan lain baik di dalam pertanian maupun non pertanian.

Tabel 11 . Distribusi Anggota Rumahtangga Menurut Sumber Matapencarian Utama dan Status Pekerjaan dan Tipe Iklim di Desa Sensus Patanas Jawa Barat, 2000

Status Pekerjaan	Tipe Iklim dan Sumber Pendapatan										Sub Total		Tot
	A		B		C		D		E		P	NP	P + NP
	P	N.P	P	N.P	P	N.P	P	N.P	P	N.P			
Tidak Bekerja	0.7	61.6	0	0	0.7	42.9	0.6	63.2	1.2	78.7	0.5	19.7	20.2
Pengus+upahan	0.7	0.5	0.8	0.1	1.7	0.4	0.1	0.1	0	0	0.2	7.8	8
Us sendiri+Upahan	29.5	1.2	30.3	4.2	32.7	2.4	12.9	1.1	11.2	0.1	9.5	1.2	10.7
Us sendiri +TK.DK	3.9	3.1	7.6	7.7	9	10.1	4.1	1.7	0	0.6	2.2	0	2.2
Usaha Sendiri	2.8	9.8	8.3	24.7	4.2	16.1	7.2	16	22.4	15.6	2.2	11	13.2
TKDK tidak dibayar	9.4	0.9	21.9	5.4	26.4	10.8	2.7	1.1	3.1	0.1	2.9	2.3	5.2
Buruh Upahan	53	22.9	31.1	57.9	25.3	17.3	72.3	16.8	62.1	4.9	20.7	19.8	40.5
Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100	99.9	100	100	100	38.2	61.8	100
Jumlah (n)	434	581	1164	1223	288	759	676	1137	161	703	2723	4403	7126

Keterangan : P = Pertanian ; NP = Non Pertanian

Pada Tabel 12, menunjukkan bahwa pada sensus tahun 1983 persentase anggota rumahtangga baik di daerah iklim basah dan kering lebih banyak melakukan kegiatan sebagai petani pengelola dan buruh tani sebagai kegiatan pokok, dan tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2000 yaitu masih tetap mengadakan sektor pertanian sebagai sumber

matapencapaian utama. Kecuali pada tipe iklim D dan E jumlah anggota rumahtangga lebih banyak melakukan kegiatan berburuh diluar pertanian dengan status pekerjaan pokok, seperti buruh industri dan bangunan. Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin marjinal kondisi lahan, akan semakin besar faktor pendorong untuk melakukan migrasi sektoral dan diversifikasi usaha, sebagai kompensasi untuk memperoleh pendapatan di luar lahan.

Tabel 12. Persentase Anggota Rumahtangga Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Iklim, 1983

Sumber Matapencapaian	Tipe Iklim dan Status pekerjaan									
	A		B		C		D		E	
	p	T	P	T	P	T	P	T	P	T
1 Pertanian										
- Petani Pengelola	70.1	29.9	71.1	28.9	77.9	22.1	69.6	30.4	87.4	22.6
- Buruh Pertanian	82.0	18.0	71.0	28.0	53.8	46.2	91.4	8.6	71.3	28.7
2. Industri Rumahtangga										
- Pengelola	88.2	11.8	64.5	35.5	58.3	41.7	87.5	12.5	75.0	25.0
- Buruh	85.7	14.3	95.1	4.9	75.0	25.0	100.0	0	100.0	0
3. Perdagangan	78.9	21.1	64.6	35.4	68.6	31.4	59.1	40.9	69.7	30.3
4. Bangunan										
- Buruh	67.7	33.3	65.8	34.2	50.9	49.1	80	20	50.0	50.0
5. Angkutan										
- Buruh	66.7	33.3	76.3	23.7	73.5	26.5	77.8	22.2	50.0	50.0
6. Jasa	75	25.0	90.8	9.2	62.5	37.5	92.8	7.1	66.7	33.3
t. Pegawai	82.1	17.9	85.5	14.2	77.4	22.6	73.1	26.9	60.0	40.0

Keterangan : P = Sebagai pekerjaan pokok ; T = sebagai pekerjaan tambahan

Di sisi lain apabila kita lihat perubahan pekerjaan utama berdasarkan curahan tenaga kerja antara tahun 1983 dan tahun 2000 (Tabel 13), menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan partisipasi pada pekerjaan utama sebagai petani dan buruh tanai, sebaliknya pekerjaan di non pertanian mengalami peningkatan. Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah tipe iklim, kecuali di daerah tipe iklim A yang mengalami peningkatan pekerjaan utama sebagai buruh tani. Dari Tabel tersebut dapat ditunjukkan juga telah terjadi pergeseran peran antar sektor dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan melalui penurunan partisipasi rumahtangga yang ada pada sensus 1983/1984 dominan di sektor pertanian, sedangkan pada sensus 2000 bergeser ke non pertanian. Faktor tersebut membuktikan bahwa peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja di pedesaan cukup besar.

Tabel 13. Perkembangan Matapencaharian Utama Rumahtangga di Daerah Penelitian PATANAS Jawa Barat, 1983–2000 (dalam persen)

Tipe Iklim	1983*)			2000**)		
	Petani	Buruh Tani	Non Pertanian	Petani	Buruh tani	Non pertanian
Tipe A	75,5	28,6	26,1	38,4	30,9	30,7
Tipe B	66,1	40,3	33,2	38,0	12,3	49,7
Tipe C	68,5	34,8	63,7	31,2	5,2	63,6
Tipe D	57,5	59,2	24,3	21,0	44,2	34,8
Tipe E	71,3	37,7	24,9	23,5	33,0	43,5

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan keterlibatan terhadap sektor tersebut sebagai pekerjaan utama dan sampingan

***) Pesentase dihitung berdasarkan keterlibatan terhadap sektor tersebut sebagai pekerjaan utama saja

Sementara itu sumber pendapatan yang diterima dalam satu rumahtangga selain diperoleh dari hasil pekerjaan, juga diperoleh pendapatan dari aset berharga yang dikuasai, seperti , sewa lahan, sakap, sumbangan atau pemberian dari pihak lain dan pensiun. Dari Tabel 14, antara tahun 1983 dan tahun 2000 telah mengalami perubahan sumber pendapatan. Di mana sumber pendapatan dari non pertanian sangat dominan dibanding pendapatan pertanian maupun berburuh tani yang cenderung turun. Hal ini mungkin disebabkan karena perkembangan ekonomi di luar sektor pertanian (sektor jasa, manufakturing, perdagangan) yang tidak saja berada di wilayah perkotaan tetapi merambah ke pedesaan, yang menyebabkan pergeseran mobilitas tenaga kerja antar sektor dan wilayah. Yang akhirnya akan terefleksi terhadap pola diversifikasi pendapatan keluarga, baik itu karena curahan tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan keluarga ataupun di luar curahan tenaga kerja (pendapatan lainnya).

Tabel 14. Perkembangan Sumber Pendapatan Utama Rumah tangga di Daerah Pedesaan PATANAS Jawa Barat , 1983 – 2000 (%).

Tipe iklim	Tahun 1983*)				Tahun 2000**)			
	Petani dan Nelayan	Buruh Tani	Non Pertanian	Lainnya	Petani dan Nelayah	Buruh Tani	Non Pertanian	Lainnya
Tipe A	90,3	33,7	28,3	9,9	36,2	39,4	28,4	6,8
Tipe B	86,9	38,5	54,9	14,3	29,8	12,7	51,2	6,3
Tipe C	79,7	41,0	64,8	9,7	20,0	4,8	64,1	11,1
Tipe D	72,9	47,2	34,1	6,9	17,2	42,8	34,4	5,6
Tipe E	81,5	28,5	31,0	20,5	23,1	33,2	40,7	3,0

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan ketrlibatan terhadap sektor tersebut sebagai sumber pendapatan utama dan sampingan.

***) Persentase dihitung berdasarkan ketrlibatan terhadap sektor tersebut sebagai sumber pendapatan utama saja

Migrasi dan Mobilitas Tenagakerja

Mobilitas tenaga yang terjadi antar sektor dan administrasi adalah karena perbedaan dalam permintaan tenagakerja yang dicerminkan oleh perbedaan tingkat upah dari pasar tenagakerja di berbagai sektor pekonomi. Oleh karena itu proses tawar menawar tenagakerja yang sesuai dengan upah akan mendorong para pekerja untuk memilih alternatif di mana kesempatan kerja berada, apakah di dalam atau di luar desa. Bila daya tarik lebih kuat di luar desa dibanding di dalam desa dengan tingkat upah yang menjanjikan atau pendapatan lebih tinggi, maka akan terjadi migrasi. Ada beberapa faktor penarik dalam kegiatan migrasi , selain tingkat pendapatan, yaitu jarak daerah migrasi, kesempatan kerja melakukan kegiatan apakah dilakukan dengan cara menginap atau tidak menginap dengan cara pulang pergi ketempat tinggal. Selain faktor penarik ada juga faktor pendorong untuk melakukan migrasi di antaranya adalah produktivitas lahan yang rendah, terbatasnya lahan, terbatasnya lapangan kerja, tingkat upah yang diterima rendah, tuntutan keluarga untuk lebih meningkatkan pendapatan keluarga (Suryana.1989; Sumaryanto dan Tahlim Sudaryanto, 1989 dan Nizwar Syafaat et al 1998).

Pada Tabel 15 memperlihatkan bahwa perkembangan jumlah anggota rumahtangga yang melakukan migrasi karena pekerjaannya meningkat dari sekitar 5,8 persen – 11,2 persen pada tahun 1983 meningkat antara 16,3 persen – 43,1 persen pada tahun 2000. Jumlah migran yang tertinggi pada daerah dengan iklim E dan D (kering). Hal ini diduga berkaitan dengan kondisi agroekosistim daerah pantai dengan sifat pekerjaan karena harus melaut baik itu sebagai anak buah kapal atau juragan laut (nahkoda). Hal ini sangat sesuai dengan faktor pendorong anggota rumahtangga untuk melakukan migrasi, yaitu karena kondisi daerah dengan produktivitas lahan yang rendah dibanding daerah basah, cenderung anggota rumahtangga untuk melakukan migrasi guna menambah pendapatan keluarga.

Tabel 15. Proporsi Anggota Rumahtangga yang Migrasi Terhadap Jumlah Anggota Rumahtangga, Jumlah Anggota Rumahtangga yang Bekerja Menurut Tipe Iklim di Desa Contoh Sensus Patanas 1983 – 2000.

Tipe Iklim	Tipe Iklim dan Tahun											
	1983						2000					
	% Terhadap Jumlah ART			% Terhadap jumlah pekerja			% terhadap jumlah ART			% terhadap jumlah pekerja		
	Jumlah ART	Jumlah Migran	%	Jumlah Pekerja	Jumlah Migran	%	Jumlah ART	Jumlah Migran	%	Jumlah Pekerja	Jumlah Migran	%
A	1658	35	2.1	601	35	5.8	1535	105	6.8	644	105	16.3
B	6441	154	2.4	2885	154	5.3	5483	595	10.8	2385	595	24.9
C	1570	58	3.7	609	58	9.5	1432	162	11.3	719	162	22.5
D	3034	114	3.7	1017	114	11.2	2522	470	18.6	1090	470	43.1
E	1024	5	0.5	286	5	1.8	877	125	14.2	309	125	40.4

Keterangan ; ART = anggota rumahtangga

Sementara itu meningkatnya jumlah migran terhadap jumlah pekerja, memperlihatkan adanya daya tarik bagi anggota rumahtangga untuk bekerja di luar desa, walaupun dengan konsekuensi jarak daerah tujuan migrasi bukan suatu hambatan apakah pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan keluar negeri. Desakan yang kuat dari para migran pada daerah tipe iklim kering yang meningkat jumlahnya kemungkinan karena begitu pesatnya pembangunan transportasi sejak tahun 1983 hingga tahun 2000, sehingga memudahkan untuk akses ketempat tujuan migrasi.

Pada penelitian Patanas tahun 1983, tujuan daerah migran tidak mencantumkan lokasi atau batas yang selama ini dikunjungi, akan tetapi berdasarkan jarak tempuh migran ke kota kecamatan. Jarak rata-rata migran ke luar desa dari seluruh tipe iklim berkisar 2,5 Km hingga 12 Km, dengan jarak terjauh ditempuh oleh para migran pada daerah tipe iklim E (12 Km) dan terdekat pada daerah tipe iklim D (2,5 Km) (Lihat hasil penelitian Patanas Jawa Barat, 1983).

Pada tahun 2000, karena permasalahan jarak bukan lagi menjadi kendala, maka ukuran lokasi migran diukur dengan batas wilayah mulai dari tingkat desa hingga ke kota provinsi, kota metropolitan, bahkan ke luar negeri. Tujuan daerah para migran ke luar desa lebih banyak ke kota luar kabupaten, Jakarta, bahkan keluar negeri. Jakarta merupakan daerah tujuan migran yang paling dominan karena dipandang menyediakan kesempatan kerja non pertanian serta didukung oleh jarak tempuh yang relatif dekat (Tabel 16). Migrasi ke luar negeri umumnya terkait dengan tenagakerja wanita sebagai TKW (tenagakerja wanita). Khusus untuk daerah dengan tipe iklim E, sebagian besar para migran belum mampu memanfaatkan ketersediaan tenagakerja yang ada untuk lebih responsif terhadap fasilitas ke daerah tujuan migrasi di kota besar bahkan di luar negeri. Hal ini merupakan

suatu indikator bahwa dengan keterbatasan sumber daya lahan, peran anggota rumahtangga hanya akses terhadap daerah sekitarnya atau dengan perkataan lain hanya sebatas di kota kecamatan.

Tabel 16. Distribusi persentase anggota rumahtangga berdasarkan daerah Tujuan, jenis kelamin dan tipe Iklim di Desa Contoh sensus Patanas Jawa Barat, 2000.

Daerah Tujuan Migrasi	Tipe Iklim dan Persentase ART					Total
	A	B	C	D	E	
Desa Lain	20.0	14.8	32.7	16.5	76	23
Kota Kecamatan	9.5	12.6	9.3	5.1	5.6	8.9
Kota Madya	2.8	12.6	9.9	6.1	5.5	8.5
Luar Kabupaten	12.3	23.0	6.8	9.9	3.9	13.6
Dalam Propinsi	5,7	11.0	13.0	0	0	6.4
Luar Propinsi	4.7	4.0	8.0	38.3	0.7	15.3
Luar Negeri	1,3	6.7	6.6	15.9	0.8	8.9
Jakarta	48,8	15.0	13.7	10.9	7.3	14.9
Jumlah : (%)	100	100	100	100	100	100
Jumlah : (n)	105	593	160	470	125	1435

Terkait dengan daerah tujuan migrasi, secara umum bahwa jenis pekerjaan sangat bervariasi sesuai dengan permintaan dan kemampuan yang mereka kuasai untuk mengisi peluang kesempatan kerja. Pada wilayah yang dominan beragroekosistem pantai (tipe A, D dan E), pekerjaan migran sebagai petani/nelayan. Sebaliknya pada daerah tipe iklim persawahan (B, dan C), pekerjaan migran di tempat tujuan yang dominan adalah sebagai pekerja non pertanian seperti perdagangan, pekerja jasa, dan perindustrian (Tabel 17). Persentase migran yang melakukan usaha di tempat tujuan migran selain sebagai buruh relatif kecil, namun sebagai tenaga kerja profesional dan tata laksana administrasi lebih banyak. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa pada tahun 2000 telah berubah orientasi permintaan tenaga kerja di daerah tujuan ke migrasi sektoral.

Tabel 17. Jenis Pekerjaan migran didaerah tujuan, sensus Patanas tahun2000

Jenis Pekerjaan	Tipe Iklim dan Persentase Migran					Total
	A	B	C	D	E	
Petani/Nelayan	2.9	3.0	8.7	7.8	39.5	8.4
Buruh tani/nelayan	22.8	1.4	0	55.4	25.0	22.2
Usaha Industri	0	1.5	1.2	0.6	0	1.0
Buruh	11.4	18.5	5.6	2.9	3.2	10.2
Industri	14.3	10.8	13.7	0.6	0	7.1
Pekerja Bangunan	3.8	15.9	13.7	4.2	16.1	11.0
Pekerja Angkutan	4.8	22.4	21.7	10.3	11.3	16.2
Pedagang	28.6	15.1	12.4	16.4	2.4	15.2
Pekerja Jasa	11.4	11.2	23.0	1.7	2.4	8.7
TK Profesional Lainnya	0	0	0	0	0	0

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Selama tujuh belas tahun terakhir perubahan ketenagakerjaan berkembang dengan dinamis sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, baik itu sebelum dan sesudah krisis. Kondisi aktual yang terjadi yaitu masih berperanya sektor pertanian sebagai katup pengaman untuk menyerap tenagakerja dari sektor non pertanian yang mengalami stagnasi atau belum tumbuh karena masalah krisis. Dilema penyerapan tenagakerja di sektor pertanian terjadi sampai dengan tahun 1992 yang secara absolut meningkat, tetapi secara relatif proporsinya menurun. Kemudian dari tahun 1992 hingga menjelang masa krisis (1997) dengan meningkatnya pertumbuhan sektor non pertanian penyerapan tenagakerja sektor pertanian menurun.

Kemudian pada tahun 1997, penyerapan tenagakerja di sektor pertanian membengkak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari beberapa sektor industri yang mengalami stagnasi atau lumpuh yang sebagian besar beralih ke sektor pertanian. Diduga dari 2,1 juta tenagakerja yang di PHK pada tahun 1997, mengharapkan sektor pertanian untuk mampu menyerap tenagakerja yang dianggap relatif sangat kecil pengaruhnya pada masa krisis.

Di tingkat mikro pada penelitian “Panel Petani Nasional” khususnya di Jawa Barat, juga terimbas oleh adanya arus balik tenagakerja yang kembali kepedesaan. Namun demikian secara kumulatif selama 17 belas tahun terakhir terjadi peningkatan angkatan kerja anggota rumahtangga seiring dengan meningkatnya pendidikan diatas 6 tahun keatas.

Fenomena yang disayangkan walaupun telah meningkat pendidikan anggota rumahtangga di pedesaan, akan tetapi penyerapan tenagakerja di sektor pertanian dengan kualitas pendidikan di bawah 6 tahun yang sama kondisinya dengan tahun 1983. Berbeda

halnya di luar sektor pertanian kualitas tenaga kerja yang diserap umumnya berpendidikan SLTP ke atas dengan umur yang relatif masih muda (30 tahun ke bawah), sedangkan sektor pertanian lebih banyak tenaga kerja yang tua dengan pendidikan di bawah 6 tahun.

Perkembangan jenis pekerjaan selama 17 tahun terakhir telah terdiversifikasi ke berbagai sektor dengan pergeseran jumlah tenaga kerja dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian, baik itu pada saat sebelum dan sesudah krisis. Pergeseran tersebut tidak saja terjadi secara sektoral, akan tetapi secara domisili yang didukung dengan semakin aksesnya suatu wilayah terhadap perkembangan transportasi dan komunikasi, akan menyebabkan meningkatnya arus migrasi yang tidak saja ke kota besar, bahkan ke ibu kota negara (Jakarta) atau ke luar negeri. Jakarta dan khususnya luar negeri (Arab Saudi, Malaysia dan negara Asia lainnya) sebagai tujuan migrasi yang mampu menyediakan lapangan kerja berupa tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW) yang jarang dilakukan oleh rumah tangga pada tahun 1983

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan di tingkat makro, maka yang perlu diatasi adalah bagaimana menumbuhkan atau mengaktifkan kembali sektor non pertanian yang lumpuh atau stagnasi karena krisis ekonomi, agar mampu menyerap tenaga kerja disektor pertanian yang semakin jenuh dengan produktivitas yang rendah. Di samping itu menegakkan kembali sektor pertanian sebagai sektor andalan untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi secara keseluruhan dengan paradigma pembangunan sektor pertanian yang berwawasan agribisnis.

Di tingkat mikro, ketersediaan tenaga kerja di pedesaan hendaknya diberdayakan dalam suatu wadah yang dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan didukung oleh pembangunan pertanian yang spesifik lokasi dan mempunyai daya saing yang tinggi, serta pengembangan sektor non pertanian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I. 1999. Additional on Indonesia' s Unemployment Crisis. Paper Presented at the in Workshop on Food and Nutrition Organized by The Indonesian Institute of sciences (LIPI). Jakarta.
- Biro Pusat Statistik . Statistik Indonesia, Berbagai Tahun (1986 – 1996). Jakarta
- Biro Pusat Statistik . Vademecum Sumberdaya, Berbagai tahun (1992 – 1997). Jakarta
- Dewa. K.S, et al. 2001. Dinamika Pasar Tenaga Kerja Struktur Upah dan Harga di Pedesaan, Makalah disajikan pada seminar rutin Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

- Erwidodo, M. Syukur, Benny R., Gatoet, S.H. 1993. Evaluasi Perkembangan Tingkat Upah di Sektor Pertanian. Monograph. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian . Bogor.
- Faisal Kasryno, 1999. Membangun Sektor Pertanian Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi Indonesia : Memantapkan Ketahanan Pangan dan Menghapus Kemiskinan. Makalah Disampaikan pada Pra Wydia dan Gizi tahun 2000. Di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian di Bogor, 19 Agustus 1999.
- Hart,G. 1986. Power, Labour and Livelihood : Processes of Change in Rural Java. University of California Press. Berkeley.
- Ikhsan, M. 1999. Kebijakan Kesempatan Kerja dan Kemiskinan. Makalah Disampaikan pada “ Round Table Discussion” Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Jakarta 23 Juni 1999.
- Manning, C.1992. Survey Recent Development. Bulletin of Indonesian Economics Studies, 28 (1). Indonesian Project. The Australian University.
- Manning, C. and S. Jaya Suriya. 1996. Survey of Recent Development. Bulletin of Indonesian Economics Studies. 32 (1). Indonesia Project. The Australian University.
- Nurmanaf, A.R. 1989. Alokasi Curahan TenagaKerja Rumahtangga Pedesaan di Lampung. Prosiding Patanas Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumahtangga Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Prayogo,U.H. et al. 1985. Pola Kesempatan Kerja dan Sumber Pendapatan di Pedesaan Jawa Barat (Patanas. 1983). Pusat Penelitian agro Ekonomi, Bogor.
- Spare , A. Jr., Harris. 1996. Education Farming and Migration in Indonesia. Economic Development and Cultural Change. Vol. 34, No.2. 1986. The University of Chicago Press. Illionis.
- Sugiarto. et al. 1996. Studi Kesempatan Kerja dan Pendapatan di Pedesaan (Patanas) Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Suryana,A. 1989. Perspektif Mobilitas dan Kesempatan Kerja Pedesaan. Prosiding Patanas Perkembnagan Struktur Produksi,Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumahtangga Pedesaan. Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Susilowati, S.H. E Suryani dan Erwidodo. 1999. Struktur TenagaKerja dan Kesempatan Kerja di Pedesaan Jawa Tengah. Makalah disampaikan dalam seminar Nasional” Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah” di Bogor, 16 – 17 Nopember 1999.
- Syafaat, N; C. Saleh dan A.S. Bagyo. 1999. Dampak Mobilitas Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan TenagaKerja dan Pendapatan Rumahtangga Pedesaan, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional “ Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah” di Bogor, 16 – 17 Nopember 1999.
- Tahlim. S. dan Sumaryanto. 1989. Faktor – faktor yang mempengaruhi Arus dan Pola Migrasi TenagaKerja Pedesaan. Prosiding Patanas Perkembangan Struktur Produksi , Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumahtangga Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- White, B. 1992. Population Involution and Employment in Rural Java, in Haris, (Ed) Rural Development : Theories of Peasant Economi and Agrarian Change. Ruthdge. London

Lampiran 1. Daftar Desa Contoh Penelitian PATANAS menurut Zona Agroekosistem di Propinsi Jawa Barat, tahun 2000

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Agroekosistem (Topografi)	Komoditas Dominan
1. Sukakarya	Sukanegara	Cianjur	A (dtg Tinggi)	The
2. Karang Jaladri	Parigi	Cianmis	A (pantai)	Perikanan
3. Pagelaran	Pagelaran	Cianjur	B (dtg tinggi)	Laut
4. Lakbok	Lakbok	Ciamis	B (dtg tinggi)	Padi sawah
5. Sodong	Saketi	Pndeglang	B (dtg tinggi)	Padi sawah
6. Nagrak	Banjaran	Bandung	B (dtg tinggi)	Padi sawah
7. Margahayu	Pangalengan	Bandung	B (dtg tinggi)	Padi sawad
8. Margamukti	Pangalengan	Bandung	B (dtg tinggi)	Sayuran
9. Pamoyaman	Ciawi	Tasikmalaya	B (dtg tinggi)	Sapi perah
10. Rajasinga	Cihideung	Indramayu	C (dtg rendah)	Padi sawah
11. Ciplanas	Kandanghaur	Indramayu	C (dtg rendah)	Padi sawah
12. Ilir	Tanjungkerta	Sumedang	D (pantai)	Padi sawah
13. Margiri	Bojonegara	Serang	D (pantai)	Perikanan
14. Sampalan	Rengasdengklok	Karawang	D (pantai)	Laut
15. Cemara Jaya	Pedesa	Karawang	E (pantai)	Perikanan laut Padi sawah Tambak

Sumber : Prayogo. dkk. 1985.

Lampiran 2. Klasifikasi Zona Agroekosistem Penelitian PATANAS

Zona Agroekosistem	Kreteria
A	- Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut dan mempunyai lebih dari bulan basah secara berturut-turut
B	- Wilayah dengan ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut mempunyai 7 – 9 bulan basah dan 2 – 4 bulan kering
C	- Wilayah dengan ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut, 5 – 6 bulan basah dan 2 – 6 bulan kering secara berturut – turut
D	- Wilayah dengan ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut, 3 – 4 bulan basah dan 2 – 6 kering secara berturut-turut
E	- Wilayah dengan ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut, mempunyai kurang dari 3 bulan basah berturut – turut dan memiliki 5 bulan kering.

Sumber ; Prayogo.dkk.1985.